



Di Persimpangan Ibu Kota dan Kota Global

Fransiskus Wisnu Wardhana Dany

Jakarta berada di persimpangan jalan antara melepas status ibu kota dan menuju kota global. Posisi ini menimbulkan kebimbangan sekaligus kesempatan menyiapkan arah pembangunan kota ke depan.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, status ibu kota secara *de jure* beralih dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur. Namun, pemindahan ibu kota masih menanti keputusan presiden. Secara *de facto*, ibu kota masih berada di Jakarta.

Saat status Jakarta tak lagi ibu kota negara, kota metropolitan ini beralih menjadi daerah khusus dengan visi-misi kota global. Hal itu tercantum dalam UU No 2/2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Visi-misi tersebut juga sudah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Tema besarnya "Mewujudkan Jakarta Kota Global yang Berketahanan, Inklusif, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan".

Tim Anggaran Pemerintah Daerah DKI Jakarta bahkan mengusulkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2025 sebesar Rp 91,1 triliun sesuai RKPD itu. Usulan disampaikan kepada Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, Selasa (22/10/2024). Jumlah ini naik dari APBD 2024 sebesar Rp 85,1 triliun setelah perubahan.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi yang dilantik pekan lalu pun diminta menyiapkan konsep Jakarta ketika nanti tidak menjadi ibu kota. Permintaan disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Jakarta akan menjadi daerah khusus. Untuk itu, Teguh dan jajaran harus menyiapkan konsep pusat ekonomi dan jasa sehingga bisa

menjadi kota global.

Pada hari pertama bekerja, Teguh langsung berdiskusi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah tentang aglomerasi dan upaya mewujudkan Jakarta sebagai kota global. Jakarta tidak hanya fokus pada pengembangan infrastruktur, tetapi harus mengubah pola pikir birokrasi dan masyarakat.

"Banyak program yang urgen dan strategis, kami harus bergerak cepat," ujar Teguh.

Sebelumnya, dalam acara Kick-Off Penyusunan Kajian Perencanaan Jakarta Menuju Kota Global yang diselenggarakan September lalu, terungkap sejumlah rencana yang ingin dicapai Pemprov DKI Jakarta. Beberapa di antaranya pengembangan sumber daya manusia (SDM) unggul, produktif, dan sejahtera agar bisa mencapai skor 92,93 berdasarkan Human Development Index, serta target net zero *emission* pada 2050 (Kompas.id, 12 September 2024).

Arah pengembangan dan target Jakarta menuju Kota Global ini dibarengi dengan sejumlah langkah strategis, yaitu penguatan *branding* (citra) dan pengembangan pariwisata perkotaan, sejarah, dan maritim; pengembangan ekonomi kreatif yang berfokus pada ekspor; serta pelestarian budaya melalui pengembangan ruang seni.

Langkah strategis berikutnya adalah menguatkan ekosistem riset dan inovasi di semua bidang; penyediaan infrastruktur kota yang andal dan berkelanjutan; serta peningkatan konektivitas dan aksesibilitas intra dan inter-kota melalui pengembangan infrastruktur transportasi massal; dan peningkatan konektivitas ke Kepulauan Seribu.

Kajian itu penting untuk menguatkan peran Jakarta sebagai kota global. Peran ini dijabarkan secara terstruktur melalui strategi yang tepat dengan mengoptimalkan sumber

daya dan keunikan kota.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta menargetkan hasil kajian itu berupa dokumen yang komprehensif, integratif, dan berkualitas. Tim penyusunnya dibantu tenaga ahli dengan standar internasional dari firma konsultan manajemen global yang menerbitkan salah satu indeks kota global (Global City Index), yaitu AT Kearney.

Kepala Bappeda DKI Jakarta Atika Nur Rahmania mengatakan, penyusunan kajian dilakukan bersama seluruh organisasi perangkat daerah dan badan usaha milik daerah (BUMD) sesuai dengan keputusan gubernur. Secara keseluruhan, penyusunan ini bergulir 5 bulan, yakni dimulai sejak tahap persiapan pada Agustus sampai finalisasi akhir tahun 2024 ini.

Terkait dengan persiapan menjadi DKJ, sebagaimana diberitakan di Kompas.id, 21 Oktober 2024, dengan masa kerja yang pendek, Teguh bekerja dengan fokus pada sejumlah persoalan di pengujung tahun ini, antara lain penanganan banjir, mitigasi gempa bumi *megathrust*, stabilitas harga bahan pangan pokok dan inflasi jelang Natal dan Tahun Baru, isu aglomerasi terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta meskipun belum keluar keputusan presiden tentang pemindahan ibu kota ke Nusantara di Kalimantan Timur, serta pengembangan infrastruktur untuk menjadi kota global.

Persimpangan

Meskipun ada persiapan menuju kota global, Guru Besar Tetap Ilmu Administrasi Publik Universitas Indonesia Irfan Ridwan Maksud melihat ada kebimbangan dari posisi Jakarta di persimpangan jalan. Apakah roda pemerintahan harus menyesuaikan UU Daerah Khusus Jakarta atau semua harus menunggu sesuai

ketentuannya jelas ada.

"Ini menyiksa. Bagaimana anggaran dan arah kebijakan mengingat gubernur dan wakil gubernur akan segera diisi. Apakah masa awal memimpin masih dengan UU lama atau UU Daerah Khusus Jakarta?" kata Irfan, Rabu (23/10).

Jakarta termasuk wilayah yang akan melangsungkan pilkada serentak pada 27 November 2024. Ada tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang berkontestasi, yakni Ridwan Kamil-Suswono, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, dan Pramono Anung-Rano Karno.

Selain itu, kata Irfan, seharusnya kementerian/lembaga terkait yang wewenangnya beririsan dengan Jakarta harus menyiapkan peraturan turunan. Jika lebih dari dua tahun berada di persimpangan, akselerasi akan terhambat.

"Tuntutan kota global sangat besar di UU Daerah Khusus Jakarta," ujar Irfan.

Terpisah, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KP-POD) Armand Suparman melihat belum keluarnya keputusan presiden tentang pemindahan ibu kota sebagai kesempatan Jakarta menyusun perencanaan dan penganggaran agar kebijakannya tepat sasaran sesuai visi-misi kota global.

"Sebetulnya kondisi sekarang belum berdampak pada roda birokrasi. Namun, Pemprov harus mempersiapkan segalanya sesuai agar langsung melaju ketika UU Daerah Khusus Jakarta diterapkan," ujar Armand.

Sebagai contoh, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta harus menyesuaikan sejumlah kewenangan khusus yang bertambah. Kewenangan ini sebelumnya menjadi urusan pusat. "Jadi melakukan penyesuaian sampai nanti siap dilaksanakan sebagai daerah khusus," ujar Armand.